

LRT Jabodebek 93% Rampung, Siap Uji Coba Pekan Depan

JAKARTA (IM) - Kepala Divisi Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan, pembangunan LRT Jabodebek sudah mendekati 93% penyelesaian. Masa pencobaan atau uji coba LRT operasi berbayar tanpa penumpang akan mulai pada Senin (15/4).

"Kita akan *grand launching* dan mulai berbayar. Mulai Senin inikita sudah coba trail running (cek), jadi ini adalah masa sebagaimana mencoba LRT beroperasi berbayar," ujar Purnomosidi dalam acara LRT Jabodebek Fun Run 2023 di GBK Arena, Jakarta pada Minggu (14/5).

Purnomosidi menjelaskan, sosialisasi akan dilakukan ke berbagai pihak, mengingat LRT Jabodebek merupakan salah satu teknologi transportasi publik baru di Indonesia. Peresmian akan jatuh pada tanggal 12 Juli 2023 dan penerapan LRT berbayar dimulai pada 17 Agustus 2023.

"Sementara belum berbayar, nanti tanggal 17 Agustus kita akan bareng dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," jelasnya.

Rute KLR akan terbagi menjadi dua area, hijau dan biru. Area hijau meliputi Bekasi hingga Dukuh Atas. Area biru meliputi Bekasi Timur hingga Dukuh Atas, bertemu di Stasiun Cawang-Cibubur-Halim, dan terintegrasi dengan kereta cepat Bandung.

"Jadi penumpang turun di Halim, terus pindah ke Kereta Jakarta Cepat. Kemudian semua jalur kita dari mulai Cawang-Dukuh Atas itu semua terintegrasi dengan Halte Transjakarta. Tapi ada satu yang menarik adalah dari Cibubur ke Dukuh Atas cuma 30 menit itu menarik loh," pungkasnya.

LRT Jabodebek belum ada tarif pasti untuk angkutan ini, namun pihaknya telah mengusulkan tarif sebesar Rp15.000 kepada pemerintah.

Selain itu, waktu operasional akan dimulai dari pukul 06.00-21.00 WIB, dilanjutkan dari 05.30-23.15 apabila setelah kembali normal.

"Agustus sampai Desember kalau permintaannya cukup tinggi, kita pasti akan segera mentransfer segera operasi normal," tuturnya. ● yan

Kasus Staycation Mencuat, Pemkab Bekasi Terbitkan Surat Edaran

BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menerbitkan surat edaran bernomor TK.04.04/SE.38/Disnaker tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan edaran tersebut diterbitkan atas dasar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan.

"Surat edaran ini sekaligus menyikapi berita yang beredar pada saat ini secara arif dan bijaksana. Kemudian menjaga kondusifitas agar iklim investasi terus tumbuh dan berkembang," katanya di Cikarang, Sabtu (13/5).

Pemerintah daerah meminta pengusaha dan pekerja menaati dan menghormati proses hukum terkait kasus dugaan kekerasan seksual modus syarat perpanjang kontrak kerja dengan ajakan bermalam di hotel (*staycation*) yang tengah berproses di kepolisian.

Perusahaan juga diminta membuat standar operasional prosedur terkait penanganan dan

pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Selain itu, perusahaan diminta membentuk rumah perlindungan pekerja perempuan agar dapat menciptakan iklim kerja yang aman, nyaman, dan sehat.

Dani mengimbau pengusaha dan pekerja hendaknya dapat mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta berkelanjutan.

Pihaknya juga membuka layanan pengaduan terkait persoalan tersebut melalui nomor telepon 081268400900 yang melayani 24 jam penuh segala bentuk aduan masyarakat. Layanan pengaduan ini di bawah koordinasi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu dapat juga disampaikan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi.

"Mana kala ada yang mengalami tindak kekerasan seksual di tempat kerja, segera melapor ke kami. Selain itu bisa juga langsung ke pihak Kepolisian Resor Metro Bekasi," kata dia. ● yan

Pemprov DKI Rumuskan Rencana Penyesuaian Gaji PJLP Jadi Rp4,9 Juta

JAKARTA (IM) - Pemerintah DKI Jakarta masih merumuskan rencana penyesuaian gaji penyedia jasa dan lainnya perorangan (PJLP) dengan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023.

Diketahui, gaji PJLP di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) hingga unit kerja daerah (UKD) sebesar Rp 4,6 juta per bulan, sedangkan UMP yang ditetapkan mencapai Rp 4,9 juta.

"Sedang kami rumuskan," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono kepada wartawan.

Joko mengingatkan, bahwa jumlah PJLP di Ibu Kota sangat banyak mencapai 132.000 orang.

Mereka bertugas membantu kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dalam melayani masyarakat di Jakarta.

"Proses pengadaannya itu kan pengadaan jasa, itu bukan gaji namanya, pembayaran jasa. Beda, jadi harus dibedakan," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya mengatakan, gaji PJLP tidak mengikuti UMP

karena penetapan UMP dilakukan setelah pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2023.

Penetapan UMP dilakukan pada bulan November 2022, sedangkan penyusunan APBD sudah dilakukan pertengahan tahun 2022 atau lebih awal beberapa bulan.

"Kan proses perubahan UMP dari Rp 4,6 juta jadi Rp 4,9 juta kan itu sudah ditetapkan, sedangkan penetapan anggaran tahun 2023 itu kan sudah dibahas di tahun 2022," katanya.

Maria belum bisa memastikan selisih Rp 300.000 gaji PJLP setiap bulan itu apakah dirapel di kemudian hari atau tidak. Soalnya rencana penyesuaian gaji PJLP masih dibahas oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Itu kami tunggu, kan itu anggaran nanti kami lihat ketersediaan anggaran, kan ada mekanisme perubahan (APBD-Perubahan 2023), pergeseran dan ada timnya (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD)," jelas Maria. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



KUNJUNGAN MENPAREKRAF KE PESANTREN NURUL HUDA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberikan sambutan saat mengunjungi Pesantren Nurul Huda, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (14/5). Pada kunjungan tersebut Sandiaga Uno memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha kepada santri dan memberikan motivasi untuk mengembangkan ekonomi digital di lingkungan pesantren

MILIKI SDM BERLIMPAH

Sekda DKI Klaim Tak Sulit Lelang 12 Jabatan Eselon II Pekan Depan

Kami memiliki SDM (sumber daya manusia) yang berlimpah, tinggal dilakukan kompetisi pekan depan agar kami mendapatkan figur yang paling bagus dan orang yang tepat menjadi pemimpin di satuan perangkat kerja daerah (SKPD), kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono.

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta bakal meleng 12 jabatan eselon II yang kosong mulai pekan depan.

Jabatan yang kosong itu terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro.

Sekretaris Daerah DKI

Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, kekosongan kursi-kursi itu bukan berarti pemerintah daerah kesulitan mencari figur yang tepat menjadi pemimpin di satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

Tetapi, pemerintah daerah menginginkan sosok yang menempati jabatan itu memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik.

"Kami memiliki SDM (sumber daya manusia) yang banyak, tinggal dilakukan kompetisi supaya kami mendapatkan paling bagus," ujar Joko, Minggu (14/5).

Joko mengatakan, 12 jabatan itu kosong karena adanya pejabat yang pensiun dan rotasi pegawai di lingkungan SKPD. Rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran pegawai di pemerintahan.

"Jadi nggak ada kendala, karena memang kami kan melakukan rotasi jabatan, kemudian memang ada beberapa yang pensiun. Kemudian yang kosong-kosong itu akan segera kami lelang jabatannya," katanya.

"Ada sekitar 12 (jabatan) segera kami lelang," lanjut pria yang pernah menjadi Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali ini.

Menurut dia, pemerintah daerah akan mengumumkan lelang jabatan ini pada pekan depan. Nantinya proses rekrutmen akan berjalan hampir dua bulan, karena ada mekanisme yang harus dilalui mulai dari tahap wawancara, penyusunan makalah dan

sebagainya bagi peserta.

"Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diumumkan, masih mungkin berjalan sekitar satu bulan, atau satu bulan setengahlah untuk proses bidding," imbuhnya.

Diketahui, ada delapan posisi Kepala SKPD yang kosong di Pemerintah DKI Jakarta. Posisi itu adalah Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Bina Marga; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Kepala Biro Hukum DKI Jakarta. Untuk sementara, kekosongan jabatan itu diisi oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas/ Kepala Badan/Kepala Biro. ● yan

Kriminalitas di Jakarta Meningkat, Heru Budi Minta Bantuan TNI-Polri

JAKARTA (IM) - Aparat gabungan menggelar apel skala besar di lapangan silang Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5) malam.

Apel itu digelar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktifitas di malam hari.

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau kepada pelaku kejahatan agar tidak beraksi lagi di DKI Jakarta.

"Saya imbau kepada seluruh masyarakat untuk menaati semua aturan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan masyarakat," tegasnya.

Ratusan aparat gabungan yang ikut apel skala besar akan memberikan keamanan yang terbaik bagi masyarakat di Jakarta.

Sehingga, tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk

beraksi di Jakarta apalagi sampai melukai masyarakat.

"Tentunya jajaran Polda dan TNI serta jajaran Pemda DKI akan memberikan yang terbaik pelayanan di bidang keamanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Ia juga meminta kepada masyarakat di tingkat RT dan RW untuk membantu aparat gabungan menjaga wilayahnya agar aman.

Sebab, keamanan wilayah bukan tanggung jawab aparat gabungan saja, tapi tanggung jawab bersama warga DKI Jakarta.

"Jadi keamanan itu bukan menjadi beban atau tanggung jawab penuh aparat keamanan tapi tanggungjawab kita semuanya," tegas Heru.

Heru menekankan kepada seluruh jajaran Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemda DKI Jakarta solid demi keamanan masyarakat.

Apalagi ia dengan Pangdam, Jaya Mayjen M Hasan sudah bersahabat sejak tujuh tahun lalu, begitu juga Kapolda Metro Jaya, Irijen Pol Karyoto.

"Ini adalah modal utama solid bersama-sama, sesuatu hal kalau kita kerja bersama pasti bisa kita atasi," katanya.

Ia juga mengingat kepada seluruh jajaran Polda Metro Jaya, Kodam dan Pemda DKI untuk berkomunikasi secara baik.

Tujuannya untuk mencegah perpecahan antara sesama pengayom masyarakat di Jakarta.

Jika mendapatkan informasi yang belum jelas, maka harus ditelaah dahulu dan menunggu arahan dari pimpinan masing-masing.

"Termasuk juga informasi data yang kita terima, kita olah baru kita mengambil sebuah keputusan," jelas Heru. ● yan

Heru Budi Minta Pemilik Ruko Bongkar Sendiri Bangunan yang 'Makan Jalan'

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta pemilik ruko di Pluit untuk membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas saluran air dan bahu jalan.

Sebelumnya bangunan ruko di atas bahu jalan di Jalan Niaga, RT 011/RW 03, Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara itu viral.

"Ya kalau bisa bongkar sendiri, kan sesuai aturan aja. Aturannya gimana," kata Heru Budi di kawasan Monas, Sabtu malam (13/5).

Untuk menangani bangunan yang melanggar itu, Heru telah meminta Wali Kota Jakarta Utara untuk mengecek bangunan ruko yang berdiri di atas saluran air dan bahu jalan itu.

"Bangunan itu udah lama kalau yang penting Pemda, Wali Kota, Pemda sesuai aturan," ujarnya.

Heru Budi meminta Wali Kota Jakarta Utara untuk mengecek trase hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ruko di Pluit itu yang belakangan ini viral di media sosial.

"Saya sudah minta Wali Kota untuk melihat trase nya, melihat aturannya, melihat IMB nya," ujarnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial soal deretan ruko yang menutupi saluran air dan bahu

jalan di Jalan Niaga, RT 011/RW 03, Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam video terlihat keributan antara Ketua RT setempat bernama Riang Prasetya dengan seorang pemilik ruko yang mendirikan bangunan di atas saluran air dan bahu jalan, berinisial F.

F terlihat emosi karena tak terima ditegur soal rukonya yang mengambal lahan saluran air dan bahu jalan.

Riang sudah berusaha menjelaskan kesalahan para pemilik tempat usaha tapi sang pemilik terlihat kesal.

"Jangan serakah pak, Indonesia punya negara pak, negara punya hukum. Enggak bisa seenaknya," kata Riang kepada pemilik ruko dalam video yang diunggah di akun media sosial Instagram Ahmad Sahroni yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

Dalam video terlihat perdebatan itu memanas. "Yang serakah lo apa gua? Mana seenaknya, lo jadi RT seenaknya," ucap pemilik ruko.

Riang mempertanyakan sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) ruko yang dimiliki F. Namun, F justru menjawab dengan emosi.

"Eh suka-suka gua. Ngapain mesti nunjukin sertifikat. Kenapa sertifikat mesti lu lihat," ujar F. ● yan



NIKAH MASSAL JUARA DI BEKASI

Sejumlah pengantin melempar bunga usai mengikuti nikah massal juara di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (14/5). Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi kegiatan nikah massal gratis yang sah secara agama dan hukum untuk 300 calon pengantin.